

# Peran Tokoh Adat Pauh Kamar dalam Kontestasi Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020

**Muhammad Akmal, Hasrul, Suryanef, Nurman S,**

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
FIS Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Hasrul**

E-mail: hasrul@fis.unp.ac.id

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan tokoh adat dalam pelaksanaan pemilihan gubernur, mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi pada pelaksanaan pemilihan gubernur Sumatera Barat di nagari Pauh Kamar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Peneliti melakukan wawancara dengan informan yang dipilih melalui purposive sampling. Informan tersebut terdiri dari Datuak, ketua PPK nan sabaris, tokoh adat, dan tokoh pemuda. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data kualitatif menggunakan metode triangulasi sumber, ketekunan pengamatan dan member check. Peneliti menemukan bahwa terdapat tiga peranan yang dilakukan oleh tokoh adat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur tahun 2020, yaitu peran sosialisasi, peran pengawasan, dan peran pencegahan konflik pasca Pilkada. Kemudian faktor yang mempengaruhi partisipasi pada pelaksanaan pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Nagari Pauh Kamar yaitu tingkat kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara, tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya satu suara dalam menentukan pemimpin di masa yang akan datang, tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Pilkada, dan faktor sosialisasi.*

**Kata Kunci: tokoh adat, partisipasi politik, pemilihan gubernur**

## **ABSTRACT**

*This research aims to describe the role of traditional leaders in the gubernatorial election, to find out the factors that influence participation in the West Sumatra gubernatorial election in Nagari Pauh Kamar. The type of research used is descriptive qualitative research. Researchers conducted interviews with informants selected through purposive sampling. The informants consisted of Datuak, chairman of the PPK who was a patient, traditional leaders and youth leaders. Data collection techniques include interviews and documentation studies. Test the validity of qualitative data using the source triangulation method, diligent observation and member check. Researchers found that there are three roles played by traditional leaders in increasing community participation in the 2020 gubernatorial election, namely the role of socialization, the role of supervision, and the role of post-election conflict prevention. Then the*

*factors that influence participation in the election for the Governor of West Sumatra Province in Nagari Pauh Kamar are the level of public trust in the organizers, the level of public awareness of the importance of one vote in determining future leaders, the level of public knowledge of Pilkada, and the socialization factor.*

**Keywords: traditional leaders, political participation, gubernatorial elections**



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2024 by author.

## **PENDAHULUAN**

Keterlibatan tokoh adat dapat mendorong meningkatnya partisipasi pemilih mengingat tokoh adat dapat menjadi sebuah panutan yang dapat dilihat oleh masyarakat karena pola pikir, kebijaksanaan dan sikap yang dimiliki oleh tokoh adat. Dengan demikian juga secara tidak langsung tokoh adat dapat menggerakkan warganya. Dalam hal ini, peran tokoh adat dengan partisipasi politik masyarakat sangat erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, jika semakin baik peran tokoh adat yang ada maka semakin banyak pula partisipasi politiknya.

Partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak bukanlah hal yang terjadi begitu saja. Selain KPU sebagai penyelenggara pilkada dalam melakukan sosialisasi, diperlukan juga peran dari elite lokal seperti tokoh adat dan tokoh masyarakat. Keikutsertaan tokoh adat dan tokoh masyarakat tersebut dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pilkada serentak menjadikan elite lokal tersebut mendapatkan peran strategis dalam menyukseskan pilkada serentak.

Dalam proses Pilkada jelas dibutuhkan peran dari tokoh adat tersebut yang merupakan representasi dari adanya sifat kepemimpinan yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan serta keinginan masyarakat yang membuat tokoh adat tersebut tidak dapat dilepaskan dari sifat kepemimpinan yang tercermin dalam diri pemimpin tersebut. Dalam hal ini tokoh adat adalah orang yang dipandang tinggi dan disegani dalam kehidupan bermasyarakat, karena tokoh adat tersebut memiliki kecakapan dan pengetahuan serta dihormati dalam sistem tatanan kehidupan dari lingkungan masyarakat yang dipimpinnya.

Menurut Irtanto (2008:159) yang dimaksud Pilkada adalah suatu proses politik untuk memilih kepala daerah secara langsung. Terselenggaranya Pilkada merupakan amanat pasal 56 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Menurut Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemilihan kepala daerah adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat di wilayah provinsi

dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Berdasarkan hasil observasi awal melalui wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan pemuda- pemuda tentang peran tokoh adat nagari Pauh Kamar dalam menumbuhkan pemahaman hak warga negara dalam kontestasi pemilihan gubernur Sumatera Barat tahun 2020, secara informal pada umumnya tokoh adat setempat akan datang ke rumah-rumah warga dan warung-warung mengisi waktu luang dan berbincang-bincang mengenai calon gubernur dan wakil gubernur dan visi misi dari pasangan calon dalam pilkada yang akan dilaksanakan dengan masyarakat yang ada. Secara formal, tokoh adat seperti wali korong dan alim ulama membuat kegiatan kemasyarakatan seperti gotong royong dan kegiatan keagamaan berupa wirid yang didalamnya terdapat informasi terkait pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan gubernur yang akan berlangsung dan juga menyampaikan informasi seperti tanggal pemilihan, lokasi pemilihan berlangsung, dan calon-calon yang akan dipilih pada pilkada tersebut. Sehingga bentuk peranan tokoh adat tersebut dalam memberikan informasi mengenai pilkada kepada masyarakat membuat masyarakat mendapatkan informasi secara keseluruhan dan tidak ketinggalan informasi mengenai pilkada, sehingga partisipasi masyarakat dapat meningkat dalam upaya menyukseskan terselenggaranya pilkada Sumatera Barat tahun 2020.

Oleh karena itu peran tokoh adat cukup strategis dalam membuat kebijakan yang mengikat seluruh masyarakat nagari pauh kamar. Keterlibatan tokoh lokal, dalam proses pemilihan umum secara langsung tidak bisa dihindarkan, karena mereka adalah potensi lokal yang dapat memberikan kontribusi atau memberi warna tersendiri bagi perpolitikan di tingkat daerah. Dengan kemampuannya bisa menciptakan kondisi politik yang kondusif dimana peran mereka sangat menentukan dalam menciptakan rakyat yang partisipatif.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu jenis penelitian Kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan keadaan sesuai dengan peristiwa yang terjadi dan di perkuat dengan fakta – fakta yang diperoleh melalui kegiatan penilaian sikap atau tanggapan individu terhadap suatu peristiwa yang terjadi (Sudaryono 2018:82). Informan dalam penelitian ini dipilih melalui purposive sampling. Informan tersebut terdiri dari *Datuak*, ketua PPK Nan Sabaris, tokoh adat, dan tokoh pemuda. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data kualitatif menggunakan metode triangulasi sumber, ketekunan pengamatan dan member check. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan

beberapa tahapan, yaitu: (1) mengemukakan kembali topic atau masalah dalam penelitian; (2) meringkas point-point penting yang ada dalam penelitian; (3) peneliti menyimpulkan masalah penelitian secara detail agar dapat memperoleh hasil dari data penelitian yang didapatkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peranan Tokoh Adat Pada Pelaksanaan Pilkada Sumatera Barat *Peran Tokoh Adat Dalam Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi***

Tokoh adat berperan dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan pilkada. Tokoh adat pauh kamar mempunyai peranan yang sangat signifikan terhadap berjalannya program- program pra dan pasca pilkada di pauh kamar. Selaku pemangku adat, seorang tokoh adat berperan dalam melaksanakan sosialisasi sebagai sebuah program pengenalan dan pemberitahuan kepada masyarakat akan pentingnya menggunakan hak pilih, mengenal demokrasi secara umum agar terbentuk kesadaran politik masyarakat yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Pada beberapa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh tokoh adat diantaranya adalah sosialisasi kepada pemuda sebagai pengenalan kepada pemilih pemula akan pentingnya ikut terlibat dalam pemilu dan dengan mengunjungi beberapa elemen masyarakat yang membutuhkan penyuluhan akan kesadaran berpolitik dan berdemokrasi terhadap masyarakat yang belum paham mengenai politik. Tokoh-tokoh adat sebagai perwakilan kepentingan dari semua elemen didalam masyarakat itu kemudian mewujudkan dalam rangka mengakomodir setiap kepentingan-kepentingan masyarakat serta senantiasa menjadi yang terdepan dalam proses pengembangan sumber daya manusia yang ada dalam masyarakatnya.

Sosialisasi adalah proses mengkomunikasikan kebudayaan kepada warga masyarakat yang baru. Secara umum (dalam Sari: 2009), sosialisasi didefinisikan sebagai proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (role theory). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu. Menurut Maclever (2013:175) sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran dan semua persyaratan lain yang diperlukan untuk partisipasi efektif dalam kehidupan sosial, kemudian Machael Rush dan Philip Althoff, 1995:27 mengutarakan bahwa Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu yang berlangsung tidak semata-mata hanya menjadi tanggung jawab KPU

sebagai penyelenggara, tetapi peran elit lokal juga sangat besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat disamping stakeholder yang lain. Tokoh adat yang memiliki nilai kepemimpinan dan dipercaya oleh masyarakat dapat menjadi faktor pendukung yang sangat besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menggunakan strategi yang digunakan oleh elit lokal tersebut.

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang dilakukan oleh tokoh adat nagari Pauh kamar terdiri dari strategi sosialisasi politik secara tatap muka dan melalui media yang bergantung kepada pendidikan politik masyarakat dan memaksimalkan fungsi dari partai politik. Kegiatan sosialisasi tatap muka merupakan strategi yang telah dilakukan oleh tokoh adat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020. Kegiatan sosialisasi tatap muka tetap dilakukan walaupun dalam kondisi saat ini yaitu pandemi. Mengingat sangat pentingnya sosialisasi walaupun kondisi pandemi tetap dilakukan sosialisasi. Namun sosialisasi tatap muka yang dilakukan tetap dalam melaksanakan protokol kesehatan. Dengan menerapkan protokol kesehatan, diharapkan tidak menimbulkan klaster baru penyebaran virus namun pesan ajakan dari sosialisasi dapat tersampaikan. Pelibatan kelompok masyarakat juga diikutsertakan dalam kegiatan sosialisasi pilkada dalam rangka upaya meningkatkan partisipasi pemilih dalam pilkada tahun 2020.

### ***Peran Tokoh Adat Dalam Melaksanakan Pengawasan***

Tokoh adat terlibat aktif dalam pengawasan partisipatif dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih calon pemimpin. Dengan adanya partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu maka diharapkan dapat menghasilkan pemilu yang demokratis baik dari prosesnya maupun hasilnya. Tokoh adat sebagai tokoh yang memiliki nilai kepemimpinan dimasyarakat mampu memberikan pemahaman betapa pentingnya satu suara yang digunakan dalam menentukan pemimpin berikutnya. Begitu pentingnya tokoh adat untuk meyakinkan masyarakat untuk menggunakan hak suaranya dan meyakinkan masyarakat agar tidak melakukan golput.

Menurut Henry Fayol (Harahap 2001), pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut juga dimaksudkan untuk mengetahui keiemanan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari. Menurut Sondang P. Siagian (2005: 135}, Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dikehendaki. Menurut George R. Terry (1977), manajemen adalah suatu proses yang berbeda terdiri dari *planning, organizing, actuating,* dan *controlling* yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang

ditentukan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Beberapa permasalahan pengawasan dalam pemilu adalah adanya beberapa fenomena maupun kasus yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemilu, antara lain pengawas pemilu yang tidak independen dan memihak pada salah satu calon/partai politik peserta pemilu, sehingga mengakibatkan adanya diskriminasi perlakuan terhadap calon/partai politik peserta pemilu terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Hal ini tentu saja akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang lahir dari proses demokrasi yang tidak berintegritas dimana asas Luber dan Jurdil tidak diamalkan dengan baik. Dalam peran pengawasan, tokoh adat terlibat sebagai pengawas partisipatif dalam pilkada di Nagari Pauh Kamar.

Objek pengawasan yang dilakukan oleh tokoh adat meliputi pengawasan dalam penempelan Daftar Pemilih Tetap (DPT), pengecekan kondisi dan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di setiap korong, serta pengecekan dan meminta data data yang dibutuhkan di kantor nagari. Adapun pola pengawasan yang dilakukan oleh tokoh adat yaitu mengikuti pergerakan PPS maupun PPK bila kegiatan tersebut meliputi kepentingan bersama misalnya pengecekan data, pengawasan pekerjaan PPS dan PPK agar tidak terjadi penyimpangan ke arah yang tidak diinginkan sehingga kondisi pemilihan dapat berjalan dengan baik dan terkendali. Dari kegiatan pengawasan yang dilakukan, tokoh adat mendapatkan informasi kegiatan yang telah diawasi dengan memberikan masukan agar kegiatan yang dilakukan oleh PPS dan PPK berjalan semestinya sehingga mendapatkan data yang valid agar dapat dipergunakan untuk menjaga kredibilitas masyarakat. Keterlibatan tokoh adat dalam pengawasan mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat setempat.

### ***Peran Tokoh Adat Dalam Pencegahan Konflik Pasca Pilkada***

Tokoh adat harus mampu berperan dalam pengendalian sosial seperti membina dan mengendalikan tingkah laku masyarakat sesuai dengan adat agar dapat mencegah konflik yang terjadi dalam pilkada. Mengawasi sebuah penanganan pelanggaran pemilu adalah proses pengawasan yang dilaksanakan secara melekat oleh pengawas pemilu, karena pengawasan pemilu yang baik akan memproduksi kualitas hasil pengawasan yang baik. Hasil pengawasan yang baik akan dapat dijadikan temuan yang berkualitas temuan yang baik dan berkualitas akan mudah diproses dalam penanganan oleh pengawas pemilu sampai tahap pemeriksaan ke pengadilan. Sehingga jika hasil pengawasan ingin dijadikan temuan, maka pengawas pemilu harus melaksanakan standar operasional (SOP) Pengawasan secara Profesional, karena proses pengawasan tersebut adalah merupakan

embrio dari kasus/ perkara yang akan ditangani oleh pengawas pemilu.

Menurut Ranupandoyo dan Hasnan, (1990) Konflik adalah ketidaksetujuan antara dua atau lebih anggota organisasi atau kelompok-kelompok dalam organisasi yang timbul karena mereka harus menggunakan sumber daya yang langka secara bersama-sama, atau menjalankan kegiatan bersama-sama, atau mempunyai status, tujuan, nilai, dan persepsi yang berbeda. Sedangkan Menurut Reksohadiprojo, (1986), konflik adalah segala macam interaksi pertentangan antara dua atau lebih pihak. Kemudian menurut Alo Liliweri konflik adalah suatu bentuk pertentangan alamiah yang berasal dari individu ataupun kelompok karena mereka terlibat mempunyai perbedaan kepercayaan, sikap, kebutuhan, dan nilai. Lewis A. Coser dalam bukunya "The Function of Social Conflict", menyatakan bahwa konflik didefinisikan sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan- tuntutan berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yang persediannya tidak mencukupi, dimana pihak- pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, melainkan juga memojokkan, merugikan, atau menghancurkan lawan mereka.

Tokoh adat adalah pihak yang berperan menegakkan aturan adat. Peranan tokoh adat adalah sangat penting dalam pengendalian sosial. Tokoh adat berperan dalam membina dan mengendalikan sikap serta tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan ketentuan adat. Dalam peranan pencegahan terjadinya konflik pemilu, tokoh adat harus memerhatikan sumber konflik, isu yang terjadi, siapa saja yang berkonflik (parties), bagaimana sikap dan kebiasaan yang berkonflik, intervensi, dan hasil akhir dari konflik tersebut. Tokoh adat harus mampu memperkuat narasi solidaritas sosial, gotong royong, dan empati Masyarakat, kemudian membangun ruang untuk mengelola partisipasi masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Penguatan jejaring struktur terkecil dimulai dari korong, dukuh, dusun, atau kampung yang bertujuan untuk memperkuat program pemilihan yang berwawasan. Strategi yang dilakukan yaitu dengan menyelesaikan masalah secara pribadi, memahami suatu masalah yang tidak bisa ditangani dan mencari penyelesaian masalah dengan yang lebih mengerti, memberikan kritikan yang membangun, bersikap tegas, dan tidak mengintimidasi sebagai pemimpin.

### **Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pada Pilgub Provinsi Sumatera Barat**

Faktor yang mendorong partisipasi dimulai karena adanya rangsangan yang membuat masyarakat ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat partisipasi dipengaruhi oleh misalnya sering mengikuti diskusi- diskusi politik melalui media massa atau diskusi-diskusi informal. Kemudian faktor karakteristik pribadi

seseorang, Dimana orang-orang berwatak sosial, yang mempunyai kepedulian besar terhadap permasalahan sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain, biasanya dengan sukarela terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik. Faktor karakteristik seseorang ini menyangkut status sosial, ekonomi, ras, dan agama seseorang. Bagaimanapun lingkungan sosial ikut mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dalam politik. Seterusnya faktor situasi dan lingkungan politik itu sendiri. Lingkungan politik yang kondusif membuat orang senang untuk berpartisipasi dalam politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis, orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik.

Menurut Suryono (2001:124), partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Bornby (1974) mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat (Webster, 1976). Sedangkan menurut Isbandi (2007) partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Bornby (1974) mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat (Webster, 1976). Menurut Isbandi (2007) partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat itu yang pertama tingkat kepercayaan kepada penyelenggara, dimana jika masyarakat sudah percaya dengan petugas pemilihan maka masyarakat tentu akan mudah saja datang ke lokasi pemungutan suara berlangsung. Kedua tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya satu suara dalam menentukan pemimpin dimasa yang akan datang, ketiga tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pemilu dan faktor yang terakhir adalah sosialisasi, dimana sosialisasi yang dimaksudkan adalah cara dari penyelenggara pemilu untuk meyakini masyarakat dalam menyalurkan suara dalam pemilihan yang berlangsung.

Partisipasi merupakan keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya

untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut. Terdapat tiga faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, yaitu karena adanya perangsang, faktor karakteristik pribadi seseorang, dan faktor situasi dan lingkungan politik itu sendiri.

## **KESIMPULAN**

Dalam peranan sosialisasi, tokoh adat memiliki materi yang disosialisasikan dimana materi sosialisasi tokoh adat tersebut berisi tentang pemilu untuk memilih gubernur dan wakil gubernur. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh tokoh adat biasanya dilokasi keramaian dalam kerumunan masyarakat seperti dalam kegiatan gotong royong ataupun di warung warung sekitar tempat tinggal masyarakat. Waktu pelaksanaan sosialisasi sendiri berdasarkan lokasi, seperti contoh sosialisasi yang berlangsung di surau atau mesjid dalam rangka wirid ataupun tabligh akbar tokoh adat akan meminta waktu 10 menit untuk memberikan sepatah duapatah kata sembari menyampaikan informasi mengenai pilkada yang akan berlangsung kepada masyarakat yang mendapatkan respon positif dari masyarakat. Dalam peran pengawasan tokoh adat terlibat aktif dalam pengawasan partisipatif dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih calon pemimpin. Dengan adanya partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu maka diharapkan akan dapat menghasilkan pemilu yang demokratis baik dari prosesnya maupun hasilnya. Kemudian peran pencegahan konflik tokoh adat adalah pihak yang berperan menegakkan aturan adat. Peranan tokoh adat adalah sangat penting dalam pengendalian sosial. Tokoh adat berperan dalam membina dan mengendalikan sikap serta tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan ketentuan adat. Dalam peranan pencegahan terjadinya konflik pemilu, tokoh adat harus memerhatikan sumber konflik, isu yang terjadi, siapa saja yang berkonflik (parties), bagaimana sikap dan kebiasaan yang berkonflik, intervensi, dan hasil akhir dari konflik tersebut.

Adapun faktor yang mempengaruhi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada sumatera barat di nagari Pauh Kamar antara lain karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat partisipasi dipengaruhi oleh misalnya sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui media massa atau diskusi- diskusi informal. Kemudian Faktor karakteristik pribadi seseorang. Orang orang berwatak sosial, yang mempunyai kepedulian besar terhadap permasalahan sosial, politik, ekonomi, dan lain- lain, biasanya dengan suka rela terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik. Faktor karakteristik seseorang, ini menyangkut status sosial, ekonomi, ras, dan agama seseorang.

Bagaimanapun lingkungan sosial ikut mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dalam politik. Terakhir faktor situasi dan lingkungan politik itu sendiri. Lingkungan politik yang kondusif membuat orang senang untuk berpartisipasi dalam politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis, orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas- aktivitas politik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Ridwan Rangkuti. (2019). *Peran Tokoh Adat Dalam Pemilihan Kepala Desa Huta Tinggi Kab. Mandailing Natal (Di Tinjau Dari Fiqh Siyasa)*. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Ananda Ilham. (2021). *Eksistensi Kebijakan Tokoh Adat Terhadap Partisipasi Masyarakat Pemilu Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Desa Pematang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan*. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Efi Marthala, Agusti. *Penghulu & Filosofi Pakaian Kebesaran Konsep Kepemimpinan Tradisional Minangkabau*. Humaniora.
- Haerul. (2018). *Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 Di Kota Makassar*. Jurnal Governance And Politics (JGP), Volume 2 Nomor 1, Tahun 2022 (hlm 10-17). E-ISSN: 2776-3471.
- Hasibuan, Rezky Panji Perdana Martua. *Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19*. Adalah 4.1 (2020): 121-128.
- Rahmat, Febri. *Dukungan Politik Elit Adat Kecamatan Kuranji Kepada Irwan Prayitno-Nasrul Abit Pada Pilkada Sumbar Tahun 2015*. Diss. Universitas Andalas, 2020.
- Ristyawati, Aprista. *Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia*. Crepido 2.2 (2020): 85-96.
- Rizki, Singgih Choirul, and Yusuf Adam Hilman. *Menakar Perbedaan Opini dalam Agenda Pelaksanaan Kontestasi Pilkada Serentak di Tengah Covid-19*. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramania 4.2 (2020): 143-155.
- Sosiawan, Edwi Arief, and Rudi Wibowo. *Kontestasi Berita Hoax Pemilu Presiden Tahun 2019 Di Media Daring Dan Media Sosial*. *Jurnal Ilmu Komunikasi* 17.2 (2020): 133-142.
- Utomo, Wahyu Wiji. *Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid 19 Dan New Normal)*. Jurnal Al-Harakah 3.01 (2020)